

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM

Muhammad Rizki Nur Kandias¹, Poni Sukaesih Kurniati²

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia

Email Korespondensi: rizkikandias99@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the strategies of the Tourism and Culture Office of West Bandung Regency in managing natural tourism. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through literature review, field observation, and in-depth interviews with purposively selected informants. The findings indicate that the management strategies have been effectively implemented in terms of planning, coordination, and learning processes. However, challenges remain in policy implementation and the development of supporting infrastructure. An adaptive approach involving regular evaluations and recognition efforts has been undertaken, yet improvements are still needed in inter-party communication and program implementation effectiveness. The study recommends policy renewal, enhanced community participation, cross-sector collaboration, utilization of digital technology, and internal capacity strengthening. This research serves as a valuable reference for formulating strategic policies in sustainable natural tourism management based on local potential.

Keywords: Government Strategy, Management, Natural Tourism.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan wisata alam. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara mendalam kepada informan yang dipilih secara *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan telah berjalan baik dalam aspek perencanaan, koordinasi, dan proses pembelajaran. Meski demikian, masih ditemukan kendala dalam implementasi kebijakan serta pembangunan infrastruktur pendukung. Pendekatan adaptif melalui evaluasi berkala dan pemberian apresiasi telah dilakukan, namun masih perlu peningkatan dalam hal komunikasi antarpihak dan efektivitas pelaksanaan program. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kebijakan, peningkatan partisipasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas internal. Studi ini penting sebagai acuan perumusan kebijakan strategis dalam pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal.

Kata kunci: Strategi Pemerintah, Pengelolaan, Wisata alam.

PENDAHULUAN

Industri pariwisata, khususnya sektor wisata alam, memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tercermin dari keberadaan 73 destinasi wisata alam (Koswandi, 2020). Namun demikian, potensi ini belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah.

Pariwisata juga menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting di Kabupaten Bandung

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

74

Indexed



SINTA 5

PKP|INDEX



Barat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan urusan kepariwisataan, termasuk pengelolaan dan pengembangan destinasi. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat memiliki akses dan tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan berbagai objek wisata. Fluktuasi kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, menunjukkan dinamika sektor ini, dengan penurunan tajam pada masa pandemi tahun 2021. Meski demikian, jumlah kunjungan wisatawan nusantara justru menunjukkan tren kenaikan signifikan, dari 514 orang per hari pada tahun 2018 menjadi 21.241 orang per hari pada tahun 2022. (*Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, 2009*)

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai menginisiasi pemasaran digital melalui media sosial sejak tahun 2021. Kepala Bidang Promosi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menegaskan pentingnya langkah ini sebagai bagian dari pemulihan sektor pariwisata pascapandemi (Adi, 2022) Meski demikian, berbagai permasalahan masih menjadi hambatan, seperti minimnya pembaruan pada website resmi Dinas yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, kurangnya fitur klasifikasi destinasi dan ketidakhadiran *dashboard* informasi menambah persoalan teknis dalam promosi wisata alam.

Di sisi lain, pengembangan infrastruktur wisata masih jauh dari optimal. Keterbatasan akses dan fasilitas yang minim berdampak pada kenyamanan wisatawan dan menurunkan minat kunjungan, yang pada akhirnya memengaruhi perekonomian lokal. Permasalahan pengawasan dan pengelolaan juga turut berkontribusi terhadap rendahnya PAD dari beberapa objek wisata. Contohnya, Air Terjun Malela dan Gua Pawon hanya menghasilkan pendapatan sekitar Rp5 juta per tahun, sedangkan Situ Ciburuy dapat menghasilkan hingga Rp28 juta per tahun (Wijaya, 2017), Ketimpangan ini mencerminkan perlunya strategi yang lebih komprehensif dalam pengelolaan dan pengawasan destinasi wisata. (Kurniati & Edwin, 2024)

Urgensi penelitian ini didasari oleh potensi besar Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan wisata alam, yang jika dikelola dengan baik, mampu mendorong pertumbuhan PAD secara signifikan. Bahkan, sektor pariwisata menyumbang sekitar 30% dari PAD Kabupaten Bandung Barat (Wijaya, 2017). Oleh karena itu, dibutuhkan kajian ilmiah yang mendalam guna mengidentifikasi potensi, mengevaluasi strategi yang telah diterapkan, serta merumuskan langkah perbaikan yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji strategi pengelolaan pariwisata di berbagai daerah. Koswandi, (2020) dalam penelitiannya di Nusa Tenggara Barat menunjukkan bahwa pengembangan sektor ini memerlukan identifikasi destinasi unggulan, penyusunan perencanaan yang terorganisir, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian Trivan (2019) juga menekankan pentingnya promosi yang berkelanjutan dan pengembangan atraksi wisata berbasis keunggulan lokal sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing daerah. Hartaman et al. (2021) menggarisbawahi pentingnya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam mengembangkan wisata budaya, dengan dukungan acara dan pertunjukan rutin sebagai daya tarik utama.

Sementara itu, penelitian Karnia dan Amaliah (2023) yang relevan dengan konteks Kabupaten Bandung Barat mengungkapkan bahwa strategi dinas pariwisata di daerah tersebut mencakup pengembangan destinasi, kelembagaan, industri, dan pemasaran. Namun, mereka juga menemukan hambatan berupa aksesibilitas yang buruk, persebaran destinasi yang tidak merata, serta kendala teknis dan sosial seperti kurangnya pemahaman masyarakat. Sebagai tambahan, Kurniati dan Edwin (2024) dalam studinya di Kabupaten Purwakarta memperlihatkan bahwa pemanfaatan aplikasi digital pariwisata dapat meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam pengelolaan sektor ini.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini menghadirkan perspektif baru dengan menyoroti aspek keberlanjutan dan evaluasi strategi pengelolaan wisata alam secara lebih kritis dan menyeluruh. Penelitian ini tidak hanya menelusuri strategi yang sudah diterapkan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya serta mengidentifikasi kendala aktual di lapangan. Dengan demikian, riset ini memberikan

pembaruan penting terhadap kajian-kajian terdahulu yang lebih fokus pada aspek perencanaan tanpa menelaah secara mendalam keberlanjutan dan tantangan implementatif di daerah. (Subakti, 2010)

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam Pengelolaan Wisata Alam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya perbaikan dan penguatan tata kelola pariwisata di daerah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan wisata alam. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual, menggali makna, dan menangkap dinamika kebijakan serta implementasinya berdasarkan realitas yang terjadi di lapangan. (K. Marrus, 2002)

Menurut Moleong (2014:6), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa alami, dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode ini dianggap tepat dalam menggambarkan strategi pengelolaan pariwisata karena fokus pada proses, makna, dan konteks sosial yang tidak dapat diukur secara statistik. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggambarkan secara mendalam keadaan sosial melalui teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. (Lexy J, 2017)

Adapun lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bandung Barat, khususnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat, serta beberapa destinasi wisata alam yang menjadi fokus pengelolaan pemerintah daerah. Informan penelitian terdiri dari beberapa aparatur dinas, pengelola wisata lokal, dan stakeholder terkait lainnya yang terlibat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan pariwisata. Data didapatkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi

PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Pengelolaan Wisata Alam

Rencana dan upaya yang dirancang oleh pimpinan daerah bertujuan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun membutuhkan waktu, dana, dan sumber daya manusia yang signifikan, strategi ini penting untuk keberlanjutan sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah merumuskan strategi untuk meningkatkan pengelolaan wisata alam dan membangun persepsi positif masyarakat terhadap upaya pengembangan sektor ini. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) merupakan dua dokumen utama yang memuat inisiatif tersebut. (Suwarsono, 2012)

Tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Dalam Pengelolaan Wisata Alam

Tujuan merupakan hal yang penting yang timbul dari kesenjangan antara kebutuhan, harapan, dan keresahan masyarakat dengan kenyataan sekarang. Tujuan ini didasarkan pada kebutuhan dan harapan masyarakat serta kenyataan sekarang untuk menentukan apa yang perlu diatasi. Dalam pengelolaan wisata alam di Kabupaten Bandung Barat, konsep "*purpose*" atau tujuan menjadi dasar dalam pembentukan arah dan strategi pemerintah daerah. Tujuan ini menjadi landasan yang mengarahkan setiap langkah dan keputusan dalam pengembangan sektor pariwisata alam di wilayah tersebut. (Warpani, 2007)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kepariwisataan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan pada 1 Juli 2024, ia menyampaikan:

“Berbicara tentang destinasi wisata terdiri dari tiga yaitu: wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya. Wisata alam perlu berkelanjutan yang disebut 4 pilar *sustainable tourism development*. Perlu ramah lingkungan, unsur pemberdayaan, unsur segi ekonomi dan kebudayaan, pengelolaan berkelanjutan, pelestarian kearifan lokal. Kita diatur oleh renstra dengan jangka lima tahun. Kalau

tahunan, ya rencana jangka pendek. Adapun fasilitasi oleh Disparbud mencakup Curug Malela dan Gua Pawon. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2021.” (David O, Kabid Pariwisata,01/07/2024).

Dari pernyataan tersebut, destinasi wisata dibagi menjadi tiga jenis: alam, buatan, dan budaya. Wisata alam mencerminkan kondisi geografis yang alami, wisata buatan mencakup fasilitas hasil konstruksi manusia, sementara wisata budaya mengacu pada lokasi dengan nilai historis, seni, atau etnografi.

Hasil observasi menunjukkan bahwa peneliti menemukan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat, serta lokasi-lokasi wisata yang dikembangkan. Setiap Kamis, staf Disparbud melakukan kunjungan lapangan sebagai implementasi misi pemerintah. Peneliti juga mengkaji Rencana Strategis Disparbud 2019–2023 yang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah 2025–2026, yang bertujuan menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah untuk masyarakat. Selain itu, peneliti mengunjungi Curug Malela sebagai prioritas Disparbud dalam pengembangan wisata alam.(Koswandi, 2020). Ditinjau dari hasil observasi dan wawancara peneliti memiliki dokumentasi sebagai penguat dari hal tersebut. Adapun dokumentasi yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 1: Matriks Renstra Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan KBB Tahun 2025-202

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	SATUAN	Kondisi Awal (Tahun 2022)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir		PBIANKAT DAERAH					
									2024		2025		2026		2026							
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
MENINGKATKAN DATA SALING FACHINISATA DAN ENCHONTI KHATIF TERHADAP SUBSEKTOR PARIWISATA	GENES RASIO	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kembangkan Sub Sektor Pariwisata Terhadap PDB	3 26 2	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	Peningkatan Destinasi Wisata yang dikembangkan	%	25	33,33	1,000,000,000	50,00	1,350,000,000	66,67	1,750,000,000	67	4,100,000,000	Diperhal					
									25	250,000,000	20	450,000,000	31	700,000,000	31	1,400,000,000	Diperhal					
									3 26 02 2 01 01	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Peningkatan destinasi pariwisata yang memenuhi standar	%	25	25	250,000,000	20	450,000,000	31	700,000,000	31	1,400,000,000	Diperhal
									3 26 02 2 01 01	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Lokasi	3	3	300,000,000	4	150,000,000	5	200,000,000	12	450,000,000	Diperhal
3 26 02 2 01 01	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Dokumen	3	3	150,000,000	4	300,000,000	5	500,000,000	12	950,000,000	Diperhal									

Sumber:Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KBB, diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel diatas bahwa Matrik Rencana Strategis (Renstra) Disparbud yang fokus pada peningkatan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif. Terdapat beberapa program seperti pengembangan dan peningkatan daya tarik wisata kabupaten/kota dengan target capaian tahunan yang meningkat dari 2024 hingga 2026. Setiap program dilengkapi indikator kinerja, target capaian, dan alokasi anggaran yang terus naik setiap tahun. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan jumlah destinasi wisata yang dikembangkan dan memenuhi standar pariwisata.(Yoeti, 2008)

Pengarahan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Dalam Pengelolaan Wisata Alam

Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang memberikan arahan dan instruksi kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pengarahan mencakup penyusunan Pedoman dan Standar Operasional dalam pengelolaan wisata alam. Pemerintah mengarahkan pengelolaan sumber daya dan inisiatif terkait wisata alam, termasuk penataan infrastruktur, penyediaan fasilitas untuk pengunjung, dan promosi destinasi. Selain itu, pemerintah menetapkan kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal, serta memastikan kegiatan wisata

memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat setempat.(Adi, 2021)

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa komunikasi melalui media sosial, khususnya Instagram dengan akun @disparbudbandungbarat, sangat informatif. Akun ini sering membuat konten menarik yang menarik perhatian kaum milenial, digunakan untuk menyebarkan informasi terkini tentang pengelolaan wisata alam, promosi acara, dan edukasi mengenai pentingnya pariwisata berkelanjutan. Melalui media sosial, pemerintah dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan lebih muda, serta memungkinkan interaksi dua arah yang lebih dinamis dengan masyarakat.

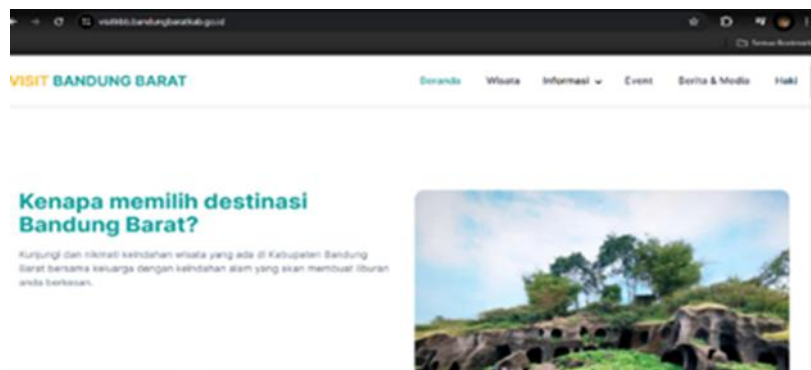
Disparbud juga memiliki website resmi bernama *Visit KBB*, namun saat ini masih dalam tahap pemeliharaan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Berdasarkan wawancara dengan admin Visit KBB pada 16 Juli 2024:

“Website visit KBB saat ini dalam proses pemeliharaan oleh Diskominfo. Kami berencana untuk memperbarui fitur-fitur, termasuk jumlah kunjungan wisatawan, destinasi hotel dan restoran, serta destinasi yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan desa wisata. Namun, pemeliharaan ini menghambat pembaruan, dan kami belum bisa melanjutkannya. Rencananya, kami juga akan menambahkan fitur bahasa Inggris agar wisatawan lebih memahami potensi yang ada di website. Pembaruan terakhir dilakukan pada awal 2023, tetapi perlu dikurasi lagi karena sejak pandemi COVID-19, beberapa pokdarwis telah tutup, dan manajemen hotel juga berubah atau tutup. Pelaku ekonomi kreatif dapat mendaftar, namun saat ini masih dalam tahap perencanaan. Sebagian besar pelaku ekonomi kreatif di Bandung Barat berasal dari subsektor fashion dan kuliner.” (Yusuf, Admin Visit KBB,16/07/2024)

Berdasarkan wawancara, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sedang meningkatkan sistem komunikasi dan informasi pariwisatanya dengan memperbarui website Visit KBB, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mengelola wisata alam secara lebih efektif dan informatif.

Saat ini, website tersebut sedang dalam tahap pemeliharaan (maintenance) yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Tujuan utama dari pembaruan ini adalah untuk meningkatkan fitur-fitur yang ada, termasuk penambahan informasi terkini tentang jumlah kunjungan wisatawan, data destinasi wisata, hotel, dan restoran. Selain itu, website ini juga akan mencakup informasi tentang destinasi yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan desa-desa wisata lainnya. Adapun tampilan Visit KBB sebagai berikut:

Gambar 2: Tampilan Beranda Website Visit KBB



Sumber: Dokumentasi peneliti, tangkapan layar per 30 April 2024 (2024).

(<https://visitkbb.bandungbaratkab.go.id>)

Gambar diatas menunjukkan bahwa tampilan utama website masih bersifat statis dan umum, namun menyajikan informasi dasar terkait jenis-jenis wisata. Meski belum memiliki fitur interaktif antar pengguna, tampilan tersebut tetap menarik dan informatif.

Tantangan dalam Pengelolaan Wisata Alam

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pengelolaan wisata alam di Kabupaten Bandung Barat menghadapi beberapa tantangan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah keterbatasan dalam pembaruan dan pemeliharaan sistem informasi pariwisata digital, seperti website Visit KBB yang masih dalam tahap pemeliharaan sehingga belum dapat memberikan informasi terkini secara optimal. Selain itu, pandemi COVID-19 berdampak pada penutupan beberapa kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan hotel, yang mempengaruhi kelangsungan operasional dan pengembangan destinasi wisata. (Bowo, 2008)

Tantangan lain adalah kebutuhan untuk memastikan keterlibatan aktif masyarakat lokal serta menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini menuntut pemerintah untuk terus mengupayakan strategi pemberdayaan dan pelatihan serta memperkuat regulasi agar pengelolaan wisata alam dapat berjalan berkelanjutan. (Asy'ari et al., 2021)

Namun untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung Barat berfokus pada pembaruan sistem komunikasi dan informasi pariwisata, termasuk pengembangan website dengan fitur-fitur baru dan bahasa Inggris agar dapat menjangkau wisatawan lebih luas. Pemerintah juga mengedepankan kolaborasi dengan masyarakat lokal dan pelaku ekonomi kreatif, memberikan fasilitasi dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas pengelolaan wisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. (Adi, 2021)

KESIMPULAN

Tulisan ini mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan wisata alam telah berjalan secara sistematis dan terarah, yang ditandai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk periode 2024–2029. Strategi ini tercermin melalui pelaksanaan pelatihan dan workshop peningkatan kapasitas SDM secara rutin, serta pemanfaatan media digital seperti media sosial dan website resmi sebagai sarana promosi dan penyebaran informasi. Meski demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti kendala teknis dalam pemeliharaan website, penurunan aktivitas Pokdarwis akibat pandemi, serta perlunya integrasi informasi wisata yang lebih terpadu.
2. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung Barat guna meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata alam. Diantaranya adalah diperlukannya evaluasi berkala destinasi, penguatan kolaborasi dengan pendekatan Pentahelix, serta pemanfaatan teknologi cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan. Pengembangan ekowisata, perbaikan infrastruktur, dan sistem pengaduan digital juga disarankan guna mendorong pengelolaan yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan. Ke depan, penelitian lanjutan dengan pendekatan berbeda dapat dilakukan untuk memperkuat strategi pengelolaan yang lebih efektif.

REFERENSI

- Adi, H. (2021). Upaya Pulihkan Pariwisata KBB, Disparbud Manfaatkan Media Sosial. *Inews Jabar*. <https://jabar.inews.id/berita/upaya-pulihkan-pariwisata-kbb-disparbud-manfaatkan-media-sosial>
- Adi, H. (2022). Miris, Objek Wisata Curug Sawyer di Cililin KBB Tak Terurus dan Memprihatinkan. *INews JABAR*. <https://jabar.inews.id/berita/miris-objek-wisata-curug-sawer-di-cililin-kbb-tak-terurus-dan-memprihatinkan/all>
- Asy'ari, R., Tahir, R., Rakhman, C. U., & Putra, R. R. (2021). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(1), 47–58. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i1.292>
- Bowo, A. (2008). *Pengambilan Keputusan dan Pemecahan Masalah*. Universitas Gunadarma.
- K.Marrus, S. (2002). *Desain penelitian Manajemen Strategi*. Rajawali Press.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

79



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 12 Nomor 1 September 2025

- Koswandi, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Pariwisata Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Agregasi Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(2), 90–113. <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i2.3817>
- Kurniati, P. S., & Edwin, M. (2024). Tourism Services in Purwakarta District Based on Ogan Lopian Application. *Proceeding of International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*, 7, 670–676. <https://doi.org/10.34010/4ytttr26>
- Lexy J, M. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Roesdakaya.
- Rusli, R., Irmawati, I., Saharuddin, S., & Kamaruddin, I. (2025). Strategy for Regional Poverty Alleviation Based on Food Security in Pohuwato Regency. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 330–352. <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.130>
- Samaun, R., Bakri, B., & Mediansyah, A. R. (2022). Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 18–33. <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>
- Sakir, A. R., Amaliah, Y. ., & Lukman, J. P. (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 3(1), 12–22. <https://doi.org/10.59713/jipik.v3i1.764>
- Subakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Suwarsono, M. (2012). *Strategi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*. Erlangga.
- Syafir Van Gobel, M., Nusi, M., & Djakaria, D. V. (2023). Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Ollot I Kecamatan Bolangitan Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 79–99. <https://doi.org/10.59713/jipik.v2i2.640>
- Umbar Sari, D. (2025). Internalization Of Local Wisdom Values To Support The Policy Of Reducing Stunting In Tinukari Village, North Kolaka Regency. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 4(1), 300–313. <https://doi.org/10.59713/jipik.v4i1.1114>
- Undang Undang nomor 10 tahun 2009 Tentang kepariwisataan.* (2009).
- Warpani, S. (2007). *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*. ITB.
- Wijaya, C. (n.d.). *Infrastruktur Kurang Memadai, Pariwisata di KBB Sulit*. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01286224/infrastruktur-kurang-memadai-pariwisata-di-kbb-sulit-berkembang-409709>
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*. Pradnya Paramitha.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

80

